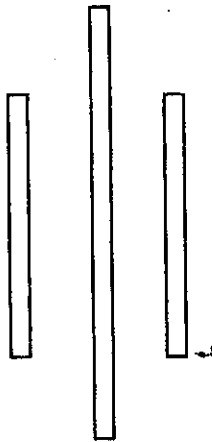




Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Nomor : PER-08/PB/2009
Tentang
Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar



DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

2009

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 08 /PB/2009

TENTANG
PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN BAGAN AKUN STANDAR

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, diperlukan Bagan Akun Standar yang lengkap dan mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban (pelaporan) seluruh transaksi keuangan yang terjadi pada Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar dinyatakan bahwa Bagan Akun Standar selanjutnya dikelola/dikurangi/ditambah oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG
PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN BAGAN AKUN STANDAR.

Pasal 1

- (1) Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar ini digunakan sebagai pedoman oleh setiap Kementerian Negara/Lembaga untuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Pelaporan Keuangan.
- (2) Ruang Lingkup penambahan dan perubahan Bagan Akun Standar ini meliputi penambahan kode akun/mata anggaran, perubahan kode akun/mata anggaran dan penjelasan, dan kode akun yang tidak digunakan lagi.

Pasal 2

Penambahan dan perubahan kode akun/mata anggaran dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini terdiri dari:

- a. penambahan kode akun/mata anggaran yang berlaku sejak tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. penambahan kode akun/mata anggaran yang berlaku sejak tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. penambahan dan/atau perubahan penjelasan kode akun/mata anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. perubahan Kodefikasi maupun Uraian kode akun/mata anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. perubahan Kodefikasi maupun Uraian Akun Neraca sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. kode akun/mata anggaran yang tidak digunakan lagi sejak tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

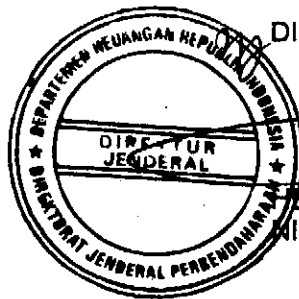
Pasal 3

Bagan Akun Standar yang tidak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2009



DIREKTUR JENDERAL

FERRY PURNOMO
NIP 060046544

**PENAMBAHAN KODE AKUN PADA PMK.91/PMK.05/2007
TENTANG BAGAN AKUN STANDAR YANG BERLAKU SEJAK TAHUN 2008**

KODE	URAIAN AKUN
AKUN NERACA	
AKUN ASET	
1113 Rekening Pemerintah Lainnya	
11132	Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Umum
111325	Rekening Pemerintah di Bank Umum dalam Rangka Penempatan
1131 Piutang Pajak	
11318	Piutang Cukai lainnya
113186	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar
113187	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar
1136 Uang muka belanja	
11363	Belanja Dibayar dimuka
113631	Belanja pegawai yang dibayar dimuka
113632	Belanja barang yang dibayar dimuka
113633	Belanja pembayaran bunga yang dibayar dimuka
1332 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
1333 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1334 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
1531 Aset Tak Berwujud	
15315 Software	
153151	Software
15316 Lisensi	
153161	Lisensi
15317 Hasil Kajian/Penelitian	
153171	Hasil Kajian/Penelitian
AKUN KEWAJIBAN	
2113 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
21131 Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	
211317	Utang Kelebihan Bayar Bea keluar
2212 Utang Jangka Panjang	
22124 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBSN	
221241	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBSN

KODE	URAIAN AKUN
AKUN PENDAPATAN	
4116 Pendapatan Pajak Lainnya	
41161 Pendapatan Pajak Lainnya	
411613	Pendapatan Pajak Penjualan (PPn) Batubara
4121 Pendapatan Bea Masuk	
41211 Pendapatan Bea Masuk	
412115	Denda atas sanksi administrasi dari pelaksanaan pengawasan terhadap barang tertentu yang pengangkutannya di dalam daerah pabean (antar pulau)
412116	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (Transaksi Non Kas)
4122 Pendapatan Bea Keluar	
41221 Pendapatan Bea Keluar	
412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar
412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar
4214 Pendapatan Kehutanan	
42144 Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan	
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar kegiatan Kehutanan
4232 Pendapatan Jasa	
42325 Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (Treasury Single Account)	
423251	Pendapatan atas penerbitan SP2D dalam rangka TSA
423252	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum
423253	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling
423254	Pendapatan dari Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia
4234 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan	
42341 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan	
423416	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi
423417	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi
4236 Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	
42361 Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	
423615	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara
4237 Pendapatan Iuran dan Denda	
42375 Pendapatan Denda	
423756	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan TSA

KODE	URAIAN AKUN
423757	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia
423758	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling
4249	Pendapatan BLU Lainnya
42491	Pendapatan BLU Lainnya
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
AKUN BELANJA	
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri
51124	Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/Polri
511245	Belanja Tunjangan Cacat dan Santunan TNI/Polri
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara
51133	Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara
511338	Belanja Tunjangan Fasilitas KPK Pejabat Negara
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
51151	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
511513	Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS
5135	Belanja Kontribusi APBN Pembayaran Pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI
51351	Kontribusi APBN sebagai pendanaan bersama dalam pembayaran Eks PNS Dephub pada PT KAI
513511	Kontribusi APBN sebagai pendanaan bersama dalam pembayaran Eks PNS Dephub pada PT KAI
551	Belanja Subsidi Perusahaan Negara
5513	Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan – Non BBM
55134	Belanja Subsidi Minyak Goreng
551341	Belanja Subsidi Minyak Goreng
552	Belanja Subsidi Perusahaan Swasta
5521	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55213	Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan
552131	Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
5811	Belanja Lain-Lain
58114	Belanja Lain-Lain III
581143	Belanja Pengembalian Penerimaan Hibah karena Pengeluaran Ineligible
581144	Belanja Kompensasi Kenaikan Harga BBM

KODE	URAIAN AKUN
581145	Dana Cadangan Resiko Kenaikan Harga Tanah
AKUN TRANSFER KE DAERAH	
6221	Transfer Dana Penyesuaian
62211	Transfer Dana Penyesuaian
622113	Transfer Dana Penyesuaian alokasi Cukai Hasil Tembakau untuk Propinsi Penghasil
622114	Transfer Dana Penyesuaian alokasi Cukai Hasil Tembakau untuk Kabupaten/Kota Daerah Penghasil
622115	Transfer Dana Penyesuaian alokasi Cukai Hasil Tembakau untuk Kabupaten/Kota Daerah Lainnya
622116	Transfer Dana Penyesuaian Infrastruktur Sarana dan Prasarana
AKUN PEMBIAYAAN	
7113	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
71131	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
711313	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)
7224	Pengembalian Pinjaman
72241	Pengembalian Pinjaman Ineligible
722411	Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran Ineligible
7241	Penyertaan Modal Negara
72411	Penyertaan Modal Negara pada BUMN
724112	Dana Investasi Pemerintah untuk Restrukturisasi BUMN
AKUN NON ANGGARAN	
8111	Penerimaan PFK 10% Gaji
81112	Penerimaan Setoran PFK Eks PNS PT KAI
811121	Penerimaan Setoran PT KAI-Iuran Pegawai PT KAI
811122	Penerimaan Setoran PT KAI-Iuran Pegawai PSL
811123	Penerimaan Setoran PT KAI-Kontribusi PT KAI
8145	Penerimaan Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan
81451	Penerimaan Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan dari Rekening 502.000000

KODE	URAIAN AKUN
814511	Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 502.000000 ke Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Penempatan
814512	Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Penempatan ke Rekening 502.000000
8211	Pengembalian Penerimaan PFK 10% Gaji
82112	Penerimaan Setoran PFK Eks PNS PT KAI
821121	Pengembalian Penerimaan Setoran PT KAI-Iuran Pegawai PT KAI
821122	Pengembalian Penerimaan Setoran PT KAI-Iuran Pegawai PSL
821123	Pengembalian Penerimaan Setoran PT KAI-Kontribusi PT KAI
8245	Pengeluaran Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan
82451	Pengeluaran Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan dari Rekening 502.000000
824511	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 502.000000 ke Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Penempatan
824512	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Penempatan ke Rekening 502.000000
8251	Pengeluaran Transito
82511	Pengeluaran Transito
825114	Pengeluaran Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa UP/TUP Tahun Anggaran Yang Lalu

**PENAMBAHAN KODE AKUN PADA PMK.91/PMK.05/2007
TENTANG BAGAN AKUN STANDAR YANG BERLAKU SEJAK TAHUN 2009**

KODE	URAIAN AKUN
AKUN PENDAPATAN	
4113	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
41131	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
411316	Pendapatan PBB Migas
4237	Pendapatan Iuran dan Denda
42375	Pendapatan Denda I
423759	Pendapatan Denda atas kekurangan/keterlambatan pelimpahan penerimaan Negara oleh Bank/Pos persepsi
42376	Pendapatan Denda II
423761	Pendapatan Denda atas kekurangan/keterlambatan pelimpahan Sal BO II ke BO I
423762	Pendapatan Denda atas kekurangan/keterlambatan pembagian PBB/BPHTB oleh BO III PBB/BPHTB
42326	Pendapatan Jasa Kepolisian
423261	Pendapatan Surat Izin Mengemudi (SIM)
423262	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
423263	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)
423264	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
423265	Pendapatan tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
423266	Pendapatan Klinik Pengemudi (KLIPENG)
423267	Pendapatan Senjata Api (SENPI)
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri
43112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Non Kas
431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Berupa Barang (Transaksi Non K
431122	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Berupa Jasa (Transaksi Non Kas
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri
43122	Pendapatan Hibah Luar Negeri Non Kas
431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri Berupa Barang (Transaksi Non Ka
431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri Berupa Jasa (Transaksi Non Kas)
AKUN BELANJA	
5131	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu
51314	Belanja Pensiun Veteran dan PKRI/KNIP
513141	Belanja Tunjangan/Dana Kehormatan Veteran RI

KODE	URAIAN AKUN
513142	Belanja Tunjangan PKRI/KNIP
5211	Belanja Barang Operasional
52111	Belanja Barang Operasional
521115	Honor terkait Operasional Satuan Kerja
5212	Belanja Barang Non Operasional
52121	Belanja Barang Non Operasional
521213	Honor terkait Output Kegiatan
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
53212	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
53312	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
53414	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan
534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan.
53415	Belanja Penambahan Nilai Irigasi
534151	Belanja Penambahan Nilai Irigasi.
53416	Belanja Penambahan Nilai Jaringan
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan.
5361	Belanja Modal Fisik Lainnya
53612	Belanja Penambahan Nilai Fisik Lainnya
536121	Belanja Penambahan Nilai Fisik Lainnya.
5521	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55212	Belanja Subsidi Kredit Program I
552126	Belanja Subsidi Bunga Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi
552127	Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Eks KLBI
552128	Belanja Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)
55213	Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan dan Risk Sharing Kredit Program
552132	Belanja Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi
55214	Belanja Subsidi Kredit Program II
552141	Belanja Subdidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias
552142	Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan
552143	Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang
AKUN TRANSFER KE DAERAH	
6211	Transfer Dana Otonomi Khusus
62111	Transfer Dana Otonomi Khusus
621114	Transfer Dana Otonomi Khusus untuk Papua Barat

KODE	URAIAN AKUN
621115	Transfer Dana Otonomi Khusus Tambahan Infrastruktur untuk Papua Barat
6221	Transfer Dana Penyesuaian
62212	Transfer Dana Penyesuaian II
622121	Transfer Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah
622122	Transfer Dana untuk Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
622123	Transfer Dana Selisih Perhitungan Dana Alokasi Khusus (DAK)
622124	Transfer Dana Selisih Perhitungan Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan Lainnya (DPIL)
AKUN PEMBIAYAAN	
7115	Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir
71151	Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir
711511	Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir
7214	Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir
72141	Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir
721411	Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PENJELASAN AKUN

PERUBAHAN URAIAN DALAM PENJELASAN	
4	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
4113	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
41131	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
411316	Pendapatan PBB Migas
	Pendapatan yang diperoleh dari penarikan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam. Mulai digunakan untuk tahun 2009.
4116	Pendapatan Pajak Lainnya
41161	Pendapatan Pajak Lainnya
411613	Pendapatan Pajak Penjualan (PPn) Batubara
	Digunakan untuk mencatat Pajak Penjualan (PPn) yang dilakukan oleh Wajib Pajak terkait dengan Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Penjualan bagi Kontraktor PKP2B Generasi I
4121	Pendapatan Bea Masuk
41211	Pendapatan Bea Masuk
412115	Pendapatan Denda atas sanksi administrasi dari pelaksanaan pengawasan terhadap barang tertentu yang pengangkutannya di dalam daerah pabean (antar pulau)
	Dalam rangka pelaksanaan undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabean, Ditjen Bea dan cukai diberi kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap barang tertentu yang pengangkutannya di dalam daerah pabean (antar pulau). Denda ini berasal dari penerapan peraturan pasal 4,7,8 dan 9 UU No 17 tahun 2006.
412116	Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah (Transaksi Non Kas)
	Untuk mencatat pendapatan bea masuk yang ditanggung pemerintah dan pada saat bersamaan dibayarkan Belanja Subsidi BM-DTP sehingga tidak mempengaruhi kas
4122	Pendapatan Bea Keluar
41221	Pendapatan Bea Keluar
412211	Pendapatan Bea Keluar
	Pendapatan yang diperoleh dari pungutan atas barang-barang yang diekspor (dahulu disebut pajak ekspor),
412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar
	Pendapatan yang diperoleh dari Denda Administrasi atas Bea keluar yang tidak dibayar/terlambat dibayar
412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar
	Pendapatan yang diperoleh dari beban Bunga atas Bea keluar yang tidak dibayar/terlambat dibayar
4214	Pendapatan Kehutanan
42144	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar kegiatan Kehutanan
	PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang luas kawasannya hutannya di atas 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau.

PERUBAHAN URAIAN DALAM PENJELASAN	
4216	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi
42161	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi
421611	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi
	Penerimaan bersih dari setoran bagian pemerintah yang berasal dari pengusaha panas bumi sesuai dengan Keppres No.49 Tahun 1991, masuk Bagian Anggaran 15.06 (Ditjen Anggaran Departemen Keuangan)
4231	Pendapatan Penjualan dan Sewa
42311	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan
423112	Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan
	Penerimaan dari penjualan sisa penelitian peternakan dan perikanan, semen beku untuk inseminasi buatan, bibit ternak, calon bibit, ternak susu, ternak afkir, hasil peternakan dan perikanan praktek siswa. Masuk Bagian Anggaran Departemen Pertanian (BA.018), Departemen Kelautan dan Perikanan (BA 032)
4232	Pendapatan Jasa
42321	Pendapatan Jasa I
423213	Pendapatan Surat Keterangan, Visa, dan Paspor
	Pendapatan dari pelayanan pembuatan Surat Keterangan, antara lain Visa dan paspor oleh Departemen Luar Negeri, pendapatan dari surat keterangan keimigrasian antara lain KITAS, izin tinggal tetap di Indonesia dari Departemen Hukum dan HAM (BA.13), Surat Keterangan Asal (SKA) dari Departemen Perdagangan (BA.090)
423214	Pendapatan Hak dan Perijinan
	Pendapatan dari permintaan hak paten, hak cipta maupun perpanjangan Merk di Departemen Hukum dan Perundang-undangan (BA 013), Pendapatan dari pendaftaran pestisida, royalti hasil penelitian dan pembuatan label obat-obatan pertanian/peternakan di Departemen Pertanian (BA 018), wajib daftar perusahaan, pengujian mutu barang dan sertifikasi mutu barang di Departemen Perindustrian dan/atau Perdagangan (BA 019), biaya hak penggunaan frekuensi radio, biaya ijin amatir radio di Dep Perhubungan (BA 022), hak dan perijinan Departemen Tenaga Kerja (BA 026), hak dan perijinan di BPN (BA.056), hak dan perijinan di Departemen Kelautan dan Perikanan (BA 032) Termasuk Hasil lelang 3G (Departemen Pariwisata pos dan telekomunikasi)
423215	Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan
	Pendapatan Sensor/Karantina, pengawasan, pemeriksaan di berbagai departemen antara lain Departemen Pertanian (BA 018), Departemen Perindustrian dan perdagangan (BA 019), Departemen Pendidikan Nasional (BA 023), Departemen Kesehatan (BA 024), Departemen Kelautan dan Perikanan (BA 032)
42325	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (Treasury Single Account)
	Cukup Jelas.
423251	Pendapatan atas penerbitan SP2D dalam rangka TSA
	Pendapatan yang diterima dari Bank Operasional atas penerbitan SP2D dalam rangka pengelolaan TSA (pendapatan Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan)
423252	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum
	Pendapatan yang diterima dari hasil penempatan uang negara pada Bank Umum (pendapatan Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan)
423253	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury National Pooling
	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury National Pooling. (pendapatan Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan)
423254	Pendapatan dari Penempatan Uang Negara di Bank Indonesia
	Pendapatan yang diterima dari hasil penempatan uang negara pada Bank Sentral

PERUBAHAN URAIAN DALAM PENJELASAN	
	(pendapatan Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan)
42326	Pendapatan Jasa Kepolisian
423261	Pendapatan Surat Izin mengemudi (SIM)
	Digunakan untuk mencatat PNB POLRI yang diterima dari pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM)
423262	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
	Digunakan untuk mencatat PNB POLRI yang diterima dari pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
423263	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)
	Digunakan untuk mencatat PNB POLRI yang diterima dari pengurusan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)
423264	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
	Digunakan untuk mencatat PNB POLRI yang diterima dari pengurusan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
423265	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
	Digunakan untuk mencatat PNB POLRI yang diterima dari pengurusan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
423266	Pendapatan Klinik Pengemudi (KLIPENG)
	Digunakan untuk mencatat PNB POLRI yang diterima dari pengelolaan Klinik Pengemudi (KLIPENG)
423267	Pendapatan Senjata Api (SENPI)
	Digunakan untuk mencatat PNB POLRI yang diterima dari pengurusan perizinan Senjata Api (SENPI)
4234	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan
42341	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan
423416	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi
	Pendapatan negara yang berasal dari lelang barang-barang tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR).
423417	Pendapatan Penjualan Hasil lelang Gratifikasi
	Pendapatan negara yang berasal dari lelang barang-barang Gratifikasi yang diserahkan oleh penyelenggara negara.
4236	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi
42361	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi
423615	Pendapatan hasil Pengembalian Uang Negara
	Pendapatan dari pengembalian uang Negara berdasarkan putusan pengadilan.
4237	Pendapatan Iuran dan Denda
42375	Pendapatan Denda I
423756	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan TSA
	Cukup Jelas, pendapatan Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan selaku Kuasa BUN
423757	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia
	Cukup Jelas, pendapatan Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan selaku Kuasa BUN
423758	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling
	Cukup Jelas, pendapatan Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan selaku Kuasa

PERUBAHAN URAIAN DALAM PENJELASAN	
	BUN
423759	Pendapatan Denda atas kekurangan/keterlambatan pelimpahan penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi
	Cukup Jelas,
	Mulai digunakan pada tahun anggaran 2009.
42376	Pendapatan Denda II
423761	Pendapatan Denda atas Kekurangan/keterlambatan Pelimpahan Saldo BO II ke BO I
	Cukup Jelas
723762	Pendapatan Denda atas kekurangan/keterlambatan Pembagian PBB/BPHTB oleh BO II PBB/BPHTB
	Cukup Jelas
4249	Pendapatan BLU Lainnya
42491	Pendapatan BLU Lainnya
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
	Kode akun ini digunakan untuk mencatat pendapatan jasa giro dan layanan perbankan yang diterima oleh Badan Layanan Umum
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri
43112	Hibah Dalam Negeri – Transaksi Non Kas
431121	Hibah Dalam Negeri Berupa Barang – Transaksi Non Kas
	Untuk mencatat pendapatan hibah dari Dalam Negeri berbentuk barang.
431122	Hibah Dalam Negeri Berupa Jasa – Transaksi Non Kas
	Untuk mencatat pendapatan hibah dari Dalam Negeri berbentuk Jasa
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri
43122	Hibah Luar Negeri – Transaksi Non Kas
431221	Hibah Luar Negeri Berupa Barang – Transaksi Non Kas
	Untuk mencatat pendapatan hibah dari Luar Negeri berbentuk barang
431222	Hibah Luar Negeri Berupa Jasa – Transaksi Non Kas
	Untuk mencatat pendapatan hibah dari Luar Negeri berbentuk Jasa
5	BELANJA PEMERINTAH PUSAT
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
51113	Belanja Tunjangan-Tunjangan II PNS
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kompensasi kerja PNS, termasuk tunjangan pengaman dan penyelamatan pelayaran, dan tunjangan kesyahbandaran yang pembayarannya selama ini berdasarkan SE DJA tanggal 28-05-1983 No. SE 74/A.23/1893, tgl 15-11-1993 NO SE 169/A.72/1983 dan tgl 02-12-1987 No. SE 83-/A.198/1987, termasuk Tunjangan Kompensasi Karya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tunjangan Kompensasi Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan (pagu tidak bersifat terbuka)
511139	Belanja Tunjangan SAR PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran Tunjangan Search and Resue untuk Pegawai Negeri Sipil
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri
51124	Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/Polri
511245	Belanja Tunjangan Cacat dan Santunan TNI/Polri
	Tunjangan yang diberikan kepada anggota TNI/Polri yang mengalami cacat dalam menjalankan tugas terhitung mulai 1 Januari 2008. Sesuai dengan PP No 56 Tahun 2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang santunan dan tunjangan cacat Prajurit TNI/POLRI

PERUBAHAN URAIAN DALAM PENJELASAN	
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara
51133	Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara
511338	Belanja Tunjangan Fasilitas Pejabat KPK
	Untuk pembayaran tunjangan pejabat KPK seperti fasilitas yang diterima
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
51151	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
511513	Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi
51211	Belanja Honorarium
511211	Belanja Uang Honor Tetap
	Digunakan untuk pembayaran honor Pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi unit organisasi yang bersangkutan
51311	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS
513111	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun PNS dan uang tunggu bagi PNS yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun
513112	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun Pejabat Negara dan uang tunggu bagi Pejabat Negara yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun, termasuk tunjangan cacat PKRI/KNIP
513113	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Dephan
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun PNS TNI/Dephan dan uang tunggu bagi PNS TNI/Dephan yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun
513114	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun PNS Polri dan uang tunggu bagi PNS Polri yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun
51312	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri
513121	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (lama)
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun TNI/Polri yang pensiun sebelum 1 April 1989
513122	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Prajurit TNI
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun Prajurit TNI dan uang tunggu bagi Prajurit TNI yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun
513123	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Polri
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun anggota Polri dan uang tunggu bagi anggota Polri yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun
51314	Belanja Pensiun Veteran dan PKRI/KNIP
513141	Belanja Tunjangan/Dana Kehormatan Veteran RI
	Digunakan untuk pembayaran Tunjangan veteran RI dan Dana Kehormatan
513142	Belanja Tunjangan PKRI/KNIP
	Digunakan untuk pembayaran Tunjangan Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) dan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
5135	Belanja Kontribusi APBN Pembayaran Pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI
51351	Kontribusi APBN sebagai pendanaan bersama dalam pembayaran Eks PNS Dephub pada PT KAI
513511	Kontribusi APBN sebagai pendanaan bersama dalam pembayaran Eks PNS Dephub pada

PERUBAHAN URAIAN DALAM PENJELASAN	
	PT KAI
	Belanja dalam rangka pembayaran pensiun eks PNS Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api sebagai pelaksanaan dari PP No 64 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia
5211	Belanja Barang Operasional
52111	Belanja Barang Operasional
521111	Belanja Keperluan Perkantoran
	Pengeluaran untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional kementerian negara/ lembaga terdiri dari :
	- Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu pengadaan barang yang habis dipakai antara lain pembelian alat-alat tulis, pembelian perlengkapan kantor, barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan tamu
	- Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya satpam/pengamanan kantor, cleaning service, telex, internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan sertifikat tanah setelah perolehan (perubahan status, balik nama), pembayaran PBB
	- Pengeluaran untuk membiayai pengadaan/penggantian Aset Tetap/BMN yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker di bawah nilai minimum kapitalisasi
	- biaya satpam/pengamanan kantor dan cleaning service pada belanja keperluan perkantoran (521111) harus didasarkan atas kontrak (dengan SPK).
521115	Honor Operasional Satuan Kerja
	Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja seperti, honor pejabat kuasa pengguna anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, honor pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM, Honor Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka, Honor Staf Pengelola Keuangan, Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa, Honor Pengelola PNBP (honor atasan langsung, bendahara dan sekretariat), honor pengelola satuan kerja (yang mengelola gaji pada Departemen Pertahanan).
	Digunakan mulai tahun anggaran 2009 (sebelumnya 512112)
5212	Belanja Barang Non Operasional
52121	Belanja Barang Non Operasional
521213	Honor Output Kegiatan
	Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti : honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluh non PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan : (pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf sekretariat)
	Digunakan mulai tahun anggaran 2009 (sebelumnya 512112)
523	Belanja Pemeliharaan
5231	Belanja Pemeliharaan
52311	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
	• Pengeluaran pemeliharaan/perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Biaya Umum, dan • pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/kantor agar kembali berada dalam kondisi normal.

PERUBAHAN URAIAN DALAM PENJELASAN	
523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
	Pengeluaran untuk membiayai pemeliharaan rumah dinas dan rumah jabatan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pejabat seperti : • istana negara, • rumah jabatan Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota/Mahkamah Agung/Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Pimpinan/Ketua Lembaga non departemen/TNI/POLRI • asrama yang terdapat di semua Departemen/Lembaga Non Departemen, termasuk TNI dan POLRI • aula yang pisah dengan Gedung Kantor/Gedung Kesenian, Art Center/Gedung Museum beserta isinya termasuk taman pagar agar kembali berada dalam kondisi normal.
52312	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar kembali berada dalam kondisi normal.
523129	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pengeluaran lainnya untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin lainnya agar kembali berada dalam kondisi normal.
52313	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
523131	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jalan dan jembatan agar kembali berada dalam kondisi normal.
523132	Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan irigasi agar kembali berada dalam kondisi normal
523133	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jaringan agar kembali berada dalam kondisi normal
52319	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya
523199	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya
	Pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap selain gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan agar berada dalam kondisi normal termasuk pemeliharaan tempat ibadah, bangunan bersejarah seperti candi, bangunan peninggalan Belanda , Jepang yang belum diubah posisinya, kondisi bangunan/Bangunan Keraton/Puri bekas kerajaan,bangunan cagar valam, cagar budaya, makam yang memiliki nilai sejarah agar kembali berada dalam kondisi normal.
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
53212	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin
	Belanja Modal setelah perolehan peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja. Dan memenuhi batasan minimum kapitalisasi sesuai dengan peraturan

PERUBAHAN URAIAN DALAM PENJELASAN	
	menteri keuangan yang mengatur batasan minimum kapitalisasi. Digunakan mulai tahun anggaran 2009 (yang sebelumnya menggunakan kode akun 53512x)
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
53312	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
	Belanja Modal setelah perolehan gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja. Dan memenuhi batasan minimum kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan minimum kapitalisasi Digunakan mulai tahun anggaran 2009 (yang sebelumnya menggunakan kode akun 53511x).
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
53414	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan
534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan
	Belanja Modal setelah perolehan jalan dan jembatan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja. Dan memenuhi batasan minimum kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan minimum kapitalisasi Digunakan mulai tahun anggaran 2009 (yang sebelumnya menggunakan kode akun 535131).
53415	Belanja Penambahan Nilai Irigasi
534151	Belanja Penambahan Nilai Irigasi
	Belanja Modal setelah perolehan irigasi yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja. Dan memenuhi batasan minimum kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan minimum kapitalisasi Digunakan mulai tahun anggaran 2009 (yang sebelumnya menggunakan kode akun 535132).
53416	Belanja Penambahan Nilai Jaringan
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan
	Belanja Modal setelah perolehan jaringan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja. Dan memenuhi batasan minimum kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan minimum kapitalisasi Digunakan mulai tahun anggaran 2009 (yang sebelumnya menggunakan kode akun 535133).
5361	Belanja Penambahan Nilai Fisik Lainnya
53612	Belanja Penambahan Nilai Fisik Lainnya
536121	Belanja Penambahan Nilai Fisik Lainnya
	Belanja Modal setelah perolehan Aset tetap lainnya yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan

PERUBAHAN URAIAN DALAM PENJELASAN	
	standar kinerja. Dan memenuhi batasan minimum kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan minimum kapitalisasi
	Digunakan mulai tahun anggaran 2009(yang sebelumnya menggunakan kode akun 535199
5513	Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan – Non BBM
55134	Belanja subsidi Non BBM-Harga II
551341	Belanja Subsidi Minyak Goreng
	Subsidi harga minyak goreng, berupa PPN penjualan minyak goreng yang ditanggung pemerintah, untuk mengendalikan harga minyak goreng agar terjangkau masyarakat.
5521	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55212	Belanja Subsidi Kredit Program I
552126	Belanja Subsidi Bunga Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi Bunga yang dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi.
552127	Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Eks KLBI
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Program eks KLBI
552128	Belanja Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Program Biofuel (Revitalisasi Perkebunan)
55213	Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan dan Risk Sharing
552131	Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan
	Kode akun ini digunakan untuk mencatat pembayaran subsidi imbalan jasa penjaminan KUR kepada lembaga penjaminan yang seharusnya dibayar oleh penerima KUR
552132	Belanja Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Klaim Resiko yang harus dibayar pemerintah kepada Perusahaan Penjaminan terhadap Penyaluran KKP (KKP)
55214	Belanja Subsidi Kredit Program II
552141	Belanja Subdidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Pemberian Pinjaman Kepada Pengusaha NAD dan Nias
552142	Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)
552143	Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Subsidi Resi Gudang
5811	Belanja Lain-Lain
58114	Belanja Lain-Lain III
581143	Belanja Pengembalian Penerimaan Hibah karena Pengeluaran Ineligible
	Pembayaran yang dilakukan berdasarkan atas Surat Menteri Keuangan No.S-138/MK.08/2008 tanggal 26 Maret 2008 tentang pembayaran senilai USD 10juta kepada Bank Dunia yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian pinjaman/hibah antara Pemerintah RI dengan Bank Dunia. Belanja akun ini dibebankan pada Bagian Anggaran 069 (BA Lain-lain).
581144	Belanja Kompensasi Kenaikan Harga BBM
	Pengeluaran yang digunakan untuk Bantuan Kepada Masyarakat sebagai Kompensasi

PERUBAHAN URAIAN DALAM PENJELASAN	
	atas kenaikan Harga BBM
581145	Dana Cadangan Resiko Kenaikan Harga Tanah
	Pengeluaran yang diberikan kepada Departemen Keuangan untuk membiayai kenaikan harga tanah pada saat pembebasan lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan tol.
6	TRANSFER KE DAERAH
6112	Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
61124	Transfer Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi
611241	Transfer DBH iuran tetap dan iuran produksi untuk Propinsi
	Menyalurkan bagi hasil iuran tetap dan iuran produksi sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil
611242	Transfer DBH iuran tetap dan iuran produksi untuk Kab./Kota Penghasil
	Menyalurkan bagi hasil iuran tetap dan iuran produksi sebesar 32 % kepada Kab/Kota penghasil
611243	Transfer DBH iuran tetap dan iuran produksi untuk Kab./Kota Lainnya dalam Propinsi bersangkutan
	Menyalurkan bagi hasil iuran tetap dan iuran produksi sebesar 32 % kepada Kab/Kota Lainnya dalam Propinsi bersangkutan
6211	Transfer Dana Otonomi Khusus
62111	Transfer Dana Otonomi Khusus
621114	Transfer Dana Otonomi Khusus untuk Papua Barat
	Cukup jelas
	Mulai digunakan pada tahun anggaran 2009.
621115	Transfer Dana Otonomi Khusus Tambahan Infrastruktur untuk Papua Barat
	Cukup jelas
	Mulai digunakan pada tahun anggaran 2009.
6221	Transfer Dana Penyesuaian
62211	Transfer Dana Penyesuaian
622113	Transfer Dana Penyesuaian alokasi Cukai Hasil Tembakau untuk Propinsi Penghasil
	Transfer dana alokasi cukai tembakau untuk Propinsi Penghasil, sesuai dengan UU tentang APBN dan UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
622114	Transfer Dana Penyesuaian alokasi Cukai Hasil Tembakau untuk Kabupaten/Kota Daerah Penghasil
	Transfer dana alokasi cukai tembakau untuk Kabupaten/Kota Daerah Penghasil, sesuai dengan UU tentang APBN dan UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
622115	Transfer Dana Penyesuaian alokasi Cukai Hasil Tembakau untuk Kabupaten/Kota Daerah Lainnya
	Transfer dana alokasi cukai tembakau untuk Kabupaten/Kota Daerah lainnya, sesuai dengan UU tentang APBN dan UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
622116	Transfer Dana Penyesuaian Infrastruktur Sarana dan Prasarana
	Cukup jelas
62212	Transfer Dana Penyesuaian II
622121	Transfer Dana Penguatan desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah
	Cukup Jelas
622122	Transfer Dana untuk Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
	Cukup Jelas
622123	Transfer Dana selisih Perhitungan Dana alokasi Khusus (DAK)

PERUBAHAN URAIAN DALAM PENJELASAN	
	Cukup Jelas
622124	Transfer Dana selisih perhitungan Dana penyesuaian infrastruktur Jalan dan Lainnya (DPIL)
	Cukup Jelas
7	PEMBIAYAAN
7115	Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir
71151	Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir
711511	Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir
	Digunakan untuk mencatat penerimaan pembiayaan dari Satker BLU yang mengelola dana bergulir sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pengelolaan dana bergulir
7123	Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga
71231	Penerimaan Obligasi Negara Luar Negeri
712311	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas
	Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari hasil penjualan obligasi Negara dalam bentuk valuta asing
712312	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara - Valas
	Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari utang bunga penjualan obligasi Negara dalam bentuk valuta asing
71232	Penerimaan Surat Perbendaharaan negara - Valas
712321	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara - Valas
	Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari hasil penjualan Surat Perbendaharaan Negara dalam bentuk valuta asing
71233	Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri - Jangka Pendek
712331	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN Valas - Jangka Pendek
	Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari hasil penjualan Surat Berharga Syariah Negara dalam bentuk valuta asing dengan jangka waktu jatuh tempo kurang dari satu tahun.
71234	Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri - Jangka Panjang
712341	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN Valas - Jangka Panjang
	Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari hasil penjualan Surat Berharga Syariah Negara dalam bentuk valuta asing dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari satu tahun.
712342	Penerimaan Imbalan dibayar di muka SBSN Valas - Jangka Panjang
	Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari imbalan yang dibayar di muka atas penjualan Surat Berharga Syariah Negara dalam bentuk valuta asing dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari satu tahun.
7214	Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir
72141	Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir
721411	Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembiayaan kepada Satker BLU yang mengelola dana bergulir sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pengelolaan dana bergulir
	Mulai digunakan pada tahun 2009 (sebelumnya menggunakan kode akun 536211)

PERUBAHAN URAIAN DALAM PENJELASAN	
7224	Pengembalian Pinjaman
72241	Pengembalian Pinjaman Ineligible
722411	Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran Ineligible sampai dengan tahun 2007
	Pembayaran yang dilakukan berdasarkan atas Surat Menteri Keuangan No.S-138/MK.08/2008 tanggal 26 Maret 2008 tentang pembayaran senilai USD 10 juta kepada Bank Dunia yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian pinjaman/hibah antara Pemerintah RI dengan Bank Dunia. Belanja akun ini dibebankan pada Bagian Anggaran 096 (BA Pembayaran Cicilan Pokok Utang)
7241	Penyertaan Modal Negara pada BUMN
72411	Penyertaan Modal Negara pada BUMN
724112	Dana Investasi Pemerintah untuk Restrukturisasi BUMN
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembiayaan yang dikelola oleh Kementerian Negara BUMN dalam rangka penyehatan BUMN

8	NON ANGGARAN
8111	Penerimaan PFK 10% Gaji
81112	Penerimaan Setoran PFK Eks PNS PT KAI
	Setoran PFK dari PT KAI dalam rangka pelaksanaan PP No 64 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia
811121	Penerimaan Setoran PT KAI-luran Pegawai PT KAI
	Penerimaan yang berasal dari setoran iuran Pegawai eks PNS pada PT KAI
811122	Penerimaan Setoran PT KAI-luran Pegawai PSL
	Penerimaan yang berasal dari setoran Past Service Liability (PSL) PT Kereta Api
811123	Penerimaan Setoran PT KAI-Kontribusi PT KAI
	Penerimaan yang berasal dari setoran kontribusi PT KAI sebagai pendanaan bersama dalam rangka pembayaran pensiun eks PNS pada PT KAI
8145	Penerimaan Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan
81451	Penerimaan Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan
814511	Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 502.000000 ke Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Penempatan
	Dilakukan dalam rangka manajemen kas
814512	Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Penempatan ke Rekening 502.000000
	Dilakukan dalam rangka manajemen kas
8211	Pengembalian Penerimaan PFK 10% Gaji
82112	Pengembalian Penerimaan Setoran PFK Eks PNS PT KAI
	Pembayaran kepada PT Taspen, dana yang dikumpulkan dari PT KAI dalam rangka pelaksanaan PP No 64 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia.
821121	Pengembalian Penerimaan Setoran PT KAI-luran Pegawai PT KAI
	Pembayaran kepada PT Taspen, dana yang dikumpulkan dari PT KAI - iuran Pegawai PT KAI
821122	Pengembalian Penerimaan Setoran PT KAI-luran Pegawai PSL
	Pembayaran kepada PT Taspen, dana yang dikumpulkan dari PT KAI - iuran Pegawai PSL

PERUBAHAN URAIAN DALAM PENJELASAN	
821123	Pengembalian Penerimaan Setoran PT KAI-Kontribusi PT KAI
	Pembayaran kepada PT Taspen, dana yang dikumpulkan dari PT KAI -Kontribusi PT KAI
8245	Pengeluaran Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan
82451	Pengeluaran Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan
824511	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 502.000000 ke Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Penempatan
	Dilakukan dalam rangka manajemen kas
824512	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Penempatan ke Rekening 502.000000
	Dilakukan dalam rangka manajemen kas
8251	Pengeluaran Transito
82511	Pengeluaran Transito
825114	Pengembalian Kelebihan setoran Sisa UP Tahun Yang Lalu
	Cukup Jelas

DAFTAR PERUBAHAN/KOREKSI BAGAN AKUN STANDAR

TERTULIS INDUK		TERTULIS PENJELASAN		SEHARUSNYA DIBACA	
MA	URAIAN	MA	URAIAN	MA	URAIAN
Akun Pendapatan					
412211	Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor	412211	Pendapatan pajak/Pungutan Ekspor	412211	Pendapatan Bea Keluar
423143	Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak	423243	Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak	423143	Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak
423149	Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya	423249	Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya	423149	Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya
423217	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	423317	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	423217	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama
423241	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan			423241	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan
423756	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA			423756	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA
423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening			423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening
		423996	Pendapatan Jasa Perbendaharaan		Tidak dipakai lagi
Akun Belanja					
411112	Pendapatan PPh Gas Alam	411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	411112	Pendapatan PPh Gas Alam
411131	Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	411131	Pendapatan PPH Fiskal Luar Negeri	411131	Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri
421211	Pendapatan Gas Bumi	421211	Pendapatan Gas Alam	421211	Pendapatan Gas Alam
423312	Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi	423312	Pendapatan BPPN atas Bunga Obligasi	423312	Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi
423713	Iuran Badan Usaha di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	423713	Pendapatan Iuran Badan Usaha di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	423713	Pendapatan Iuran Badan Usaha di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
423753	Pendapatan Denda Administrasi BPHTB	423753	Pendapatan atas Denda Administrasi BPHTB	423753	Pendapatan Denda Administrasi BPHTB
511136	Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta/Badan/Komisi	511136	Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS	511136	Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta/Badan/Komisi
511139	Belanja Tunjangan SAR PNS			511139	Belanja Tunjangan SAR PNS
511141	Belanja Tunj. Sewa Rumah PN/Staff di LN	511141	Belanja Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN)	511141	Belanja Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN)
511142	Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PN/Staff di LN	511142	Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)	511142	Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)
511143	Belanja Tunj. Social Security PN/Staff di LN	511143	Belanja Tunj. Social Security PNS (Staff di LN)	511143	Belanja Tunj. Social Security PNS (Staff di LN)
511144	Belanja Tunj. Asuransi Kecelakaan PN/Staff di LN	511144	Belanja Tunj. Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN)	511144	Belanja Tunj. Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN)
511145	Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PN/Staff di LN	511145	Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN)	511145	Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN)

TERTULIS INDUK		TERTULIS PENJELASAN		SEHARUSNYA DIBACA	
MA	URAIAN	MA	URAIAN	MA	URAIAN
511146	Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PN/Staff di LN	511146	Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN)	511146	Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN)
511147	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PN Dalam dan Luar Negeri	511147	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri	511147	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri
511149	Belanja Lokal Staff Lainnya	511148	Belanja Lokal Staff Lainnya	511149	Belanja Lokal Staff Lainnya
511186	Belanja Tunj. Kewanitaan PNS TNI/Polri	511186	Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS TNI/Polri	511186	Belanja Tunj. Kewanitaan PNS TNI/Polri
511187	Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS TNI/Polri	511187	Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS TNI/Polri	511187	Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS TNI/Polri
511188	Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS TNI/Polri	511188	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS TNI/Polri	511188	Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS TNI/Polri
511189	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS TNI/Polri	511188	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS TNI/Polri	511189	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS TNI/Polri
511233	Belanja Tunj. BabinkamtibmasTNI/POLRI	511233	Belanja Tunj. Babinsa TNI/POLRI	511233	Belanja Tunj. BabinkamtibmasTNI/POLRI
511234	Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI	511234	Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI dan PNS TNI/POLRI	511234	Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI
511235	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI	511235	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI TNI/POLRI	511235	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI
511236	Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI	511236	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/POLRI	511236	Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI
511237	Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI	511237	Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI	511237	Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI
511238	Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI	511238	Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI	511238	Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI
		511239	Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI		Tidak ada
511519	Belanja Tunjangan Lainnya	511513	Belanja Tunjangan Lainnya	511519	Belanja Tunjangan Lainnya
511511	Belanja Gaji Pokok Pegawai	511511	Belanja Gaji Pokok Pegawai	511511	Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS
511512	Belanja Tunjangan Pegawai	511512	Belanja Tunjangan Pegawai	511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS
511513	Belanja Tunjangan Lainnya	511513	Belanja Tunjangan Lainnya	511513	Belanja Tunjangan Lainnya Non PNS
521113	Belanja untuk menambah daya tahan tubuh	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

TERTULIS INDUK		TERTULIS PENJELASAN		SEHARUSNYA DIBACA	
MA	URAIAN	MA	URAIAN	MA	URAIAN
52421	Belanja Perjalanan Luar Negeri	52421	Belanja Perjalanan Luar Negeri	52421	Belanja Perjalanan Luar Negeri
524211	Belanja perjalanan biasa	524111	Belanja perjalanan biasa	524211	Belanja perjalanan biasa - luar negeri
524212	Belanja perjalanan tetap	524112	Belanja perjalanan tetap	524212	Belanja perjalanan tetap - luar negeri
524219	Belanja perjalanan lainnya	524119	Belanja perjalanan lainnya	524219	Belanja perjalanan lainnya - luar negeri
534122	Belanja Modal Irigasi	534121	Belanja Modal Irigasi	534121	Belanja Modal Irigasi
534127	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Irigasi	534127	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Irigasi	534127	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Irigasi
535111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Yang Dikapitalisasi			535111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Yang Dikapitalisasi
535119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya Yang Dikapitalisasi			535119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya Yang Dikapitalisasi
53512	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Yang Dikapitalisasi	53512	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Yang Dikapitalisasi	53512	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Yang Dikapitalisasi
535129	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dikapitalisasi	523219	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dikapitalisasi	535129	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dikapitalisasi
535132	Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi Yang Dikapitalisasi	535132	Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi.	535132	Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi Yang Dikapitalisasi
535139	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Yang Dikapitalisasi	535133	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan yang dikapitalisasi.	535133	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan yang dikapitalisasi.
535199	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya Yang Dikapitalisasi	535191	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya yang dikapitalisasi	535191	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya yang dikapitalisasi
536211	Belanja Dana Bergulir			536211	Belanja Dana Bergulir
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	537112	Belanja Modal Peralatan dan Gedung	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
541221	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan			541221	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan
541229	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya			541229	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya
546111	Belanja Pembayaran Disocunt SBSN - Jangka Pendek - Valas			546121	Belanja Pembayaran Disocunt SBSN - Jangka Pendek - Valas

TERTULIS INDUK		TERTULIS PENJELASAN		SEHARUSNYA DIBACA	
MA	URAIAN	MA	URAIAN	MA	URAIAN
54612	Belanja Pembayaran Discount SBSN- Jangka Pendek			54612	Belanja Pembayaran Discount SBSN- Jangka Pendek
546111	Belanja Pembayaran Discount SBSN Jangka Pendek - Valas			546121	Belanja Pembayaran Discount SBSN Jangka Pendek - Valas
546119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount SBSN Jangka Pendek - Valas			546129	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount SBSN Jangka Pendek - Valas
573111	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya
581124	Belanja Pemilu tahunan	581124	Belanja Pemilu/sidang tahunan	581124	Belanja Pemilu
581131	Belanja Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP	581131	Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP	581131	Belanja Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP
Akun Transfer ke Daerah					
611111	Transfer DBH PPh ps1 21 untuk Propinsi	611111	Transfer Bagi hasil PPh ps1 21 untuk Propinsi	611111	Transfer DBH PPh ps1 21 untuk Propinsi
611112	Transfer DBH PPh ps1 21 untuk Kabupaten/Kota	611112	Transfer Bagi hasil PPh ps1 21 untuk Kabupaten/Kota	611112	Transfer DBH PPh ps1 21 untuk Kabupaten/Kota
611113	Transfer DBH PPh ps1 25/29 OP untuk Propinsi	611113	Transfer Bagi hasil PPh ps1 25/29 OP untuk Propinsi	611113	Transfer DBH PPh ps1 25/29 OP untuk Propinsi
611114	Transfer DBH PPh ps1 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota	611114	Transfer Bagi hasil PPh ps1 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota	611114	Transfer DBH PPh ps1 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota
611121	Transfer DBH PBB untuk Propinsi	611121	Transfer Bagi hasil PBB untuk Propinsi	611121	Transfer DBH PBB untuk Propinsi
611122	Transfer DBH PBB untuk Kabupaten/Kota	611122	Transfer Bagi hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	611122	Transfer DBH PBB untuk Kabupaten/Kota
611123	Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi	611123	Transfer Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi	611123	Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi
611124	Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kab./Kota	611124	Transfer Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kab./Kota	611124	Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kab./Kota
611125	Transfer DBH bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota	611125	Transfer PBB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota	611125	Transfer DBH bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota
611131	Transfer DBH BPHTB untuk Propinsi	611131	Transfer Bagi hasil BPHTB untuk Propinsi	611131	Transfer DBH BPHTB untuk Propinsi
611132	Transfer DBH BPHTB untuk Kabupaten/Kota	611132	Transfer Bagi hasil BPHTB untuk Kabupaten/Kota	611132	Transfer DBH BPHTB untuk Kabupaten/Kota
611133	Transfer DBH BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota	611133	Transfer BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota	611133	Transfer DBH BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota
611211	Transfer DBH minyak bumi untuk Propinsi	611211	Transfer Bagi hasil minyak bumi untuk Propinsi	611211	Transfer DBH minyak bumi untuk Propinsi
611212	Transfer DBH minyak bumi untuk Kab./Kota Penghasil	611212	Transfer Bagi hasil minyak bumi untuk Kab./Kota Penghasil	611212	Transfer DBH minyak bumi untuk Kab./Kota Penghasil

TERTULIS INDUK		TERTULIS PENJELASAN		SEHARUSNYA DIBACA	
MA	URAIAN	MA	URAIAN	MA	URAIAN
611213	Transfer DBH minyak bumi untuk Kab./Kota lainnya	611213	Transfer Bagi hasil minyak bumi untuk Kab./Kota lainnya	611213	Transfer DBH minyak bumi untuk Kab./Kota lainnya
611221	Transfer DBH Gas Bumi untuk Propinsi	611221	Transfer Bagi hasil gas alam untuk Propinsi	611221	Transfer DBH Gas Bumi untuk Propinsi
611222	Transfer DBH Gas Bumi untuk Kab./Kota Penghasil	611222	Transfer Bagi hasil gas alam untuk Kab./Kota Penghasil	611222	Transfer DBH Gas Bumi untuk Kab./Kota Penghasil
611223	Transfer DBH Gas Bumi untuk Kab./Kota lainnya	611223	Transfer Bagi hasil gas alam untuk Kab./Kota lainnya	611223	Transfer DBH Gas Bumi untuk Kab./Kota lainnya
611231	Transfer DBH iuran tetap untuk Propinsi	611231	Transfer Bagi hasil iuran tetap untuk Propinsi	611231	Transfer DBH iuran tetap untuk Propinsi
611232	Transfer DBH iuran tetap untuk Kab./Kota	611232	Transfer Bagi hasil iuran tetap untuk Kab./Kota	611232	Transfer DBH iuran tetap untuk Kab./Kota
611233	Transfer DBH royalti untuk Propinsi	611233	Transfer Bagi hasil royalti untuk Propinsi	611233	Transfer DBH royalti untuk Propinsi
611234	Transfer DBH royalti untuk Kab./Kota Penghasil	611234	Transfer Bagi hasil royalti untuk Kab./Kota Penghasil	611234	Transfer DBH royalti untuk Kab./Kota Penghasil
611235	Transfer DBH royalti untuk Kab./Kota lainnya	611235	Transfer Bagi hasil royalti untuk Kab./Kota lainnya	611235	Transfer DBH royalti untuk Kab./Kota lainnya
61124	Transfer DBH Pertambangan Panas Bumi	61124	Transfer DBH Pertambangan Panas Bumi	61124	Transfer DBH Pertambangan Panas Bumi
611241	Transfer DBH Setoran bagian pemerintah untuk Propinsi	611241	Transfer Bagi Hasil iuran tetap untuk Propinsi	611241	Transfer DBH iuran tetap dan iuran produksi untuk Propinsi
611242	Transfer DBH Setoran bagian pemerintah untuk Kab./Kota Penghasil	611242	Transfer Bagi Hasil iuran tetap untuk Kab./Kota	611242	Transfer DBH iuran tetap dan iuran produksi untuk Kab./Kota Penghasil
611243	Transfer DBH Setoran bagian pemerintah untuk Kab./Kota Lainnya	611243	Transfer Bagi Hasil royalti untuk Propinsi	611243	Transfer DBH iuran tetap dan iuran produksi untuk Kab./Kota Lainnya dalam Propinsi bersangkutan
611244	Transfer DBH iuran tetap dan iuran produksi untuk Propinsi	611244	Transfer Bagi Hasil royalti untuk Kab./Kota Penghasil	611244	Tidak digunakan lagi
611245	Transfer DBH iuran tetap dan iuran produksi untuk Kab./Kota Penghasil	611245	Transfer Bagi Hasil royalti untuk Kab./Kota Lainnya	611245	Tidak digunakan lagi
611246	Transfer DBH iuran tetap dan iuran produksi untuk Kab./Kota Lainnya			611246	Tidak digunakan lagi
611251	Transfer DBH IIUPH/IHPH untuk Propinsi	611251	Transfer Bagi hasil IHPH untuk Propinsi	611251	Transfer DBH IIUPH/IHPH untuk Propinsi
611252	Transfer DBH IIUPH/IHPH untuk Kab./Kota	611252	Transfer Bagi hasil IHPH untuk Kab./Kota	611252	Transfer DBH IIUPH/IHPH untuk Kab./Kota Penghasil
611253	Transfer DBH PSDH untuk Propinsi	611253	Transfer Bagi hasil PSDH untuk Propinsi	611253	Transfer DBH PSDH untuk Propinsi
611254	Transfer DBH PSDH untuk Kab./Kota Penghasil	611254	Transfer Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil	611254	Transfer DBH PSDH untuk Kab./Kota Penghasil

TERTULIS INDUK		TERTULIS PENJELASAN		SEHARUSNYA DIBACA	
MA	URAIAN	MA	URAIAN	MA	URAIAN
611255	Transfer DBH PSDH untuk Kab./Kota lainnya	611255	Transfer Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya	611255	Transfer DBH PSDH untuk Kab./Kota lainnya
61125	Transfer Dana Bagi Hasil Perikanan	61126	Transfer Bagi hasil Perikanan	61126	Transfer Dana Bagi Hasil Perikanan
611251	Transfer DBH Perikanan untuk Kab./Kota	611261	Transfer Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota	611261	Transfer DBH Perikanan untuk Kab./Kota
61311	Transfer DAK Bidang Pendidikan	61311	Transfer DAK untuk Pendidikan	61311	Transfer Dana Alokasi Khusus
613111	Transfer DAK Bidang Pendidikan	613111	Transfer DAK untuk Pendidikan	613111	Transfer Dana Alokasi Khusus
613121	Transfer DAK Bidang Kesehatan	613121	Transfer DAK untuk Kesehatan	613121	Tidak digunakan lagi
613131	Transfer DAK Bidang Infrastruktur	613131	Transfer DAK untuk infrastruktur	613131	Tidak digunakan lagi
613141	Transfer DAK Bidang Prasarana Pemerintahan	613141	Transfer DAK untuk Prasarana Pemerintahan	613141	Tidak digunakan lagi
613151	Transfer DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	613151	Transfer DAK untuk Kelautan dan Perikanan	613151	Tidak digunakan lagi
613161	Transfer DAK Bidang Pertanian	613261	Transfer DAK untuk Pertanian	613161	Tidak digunakan lagi
613171	Transfer DAK Bidang Lingkungan Hidup	613271	Transfer DAK untuk Lingkungan Hidup	613171	Tidak digunakan lagi
Akun Pembiayaan					
711441	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara	711411	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara	711411	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara
712112	Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya	712119	Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya	712119	Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya
712123	Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya	712129	Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya	712129	Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya
715211	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar TAB Negeri kepada Daerah	715211	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAB kepada Pemda	715211	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAB Kepada Pemda
715221	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar TAYL Negeri kepada Daerah	715221	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Pemda	715221	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAYL Negeri Kepada Pemda
719112	Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening KUN Rekening Valuta USD Karena Selisih Kurs	719112	Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening KUN Valuta USD karena Selisih Kurs	719112	Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening KUN Valuta USD Karena Selisih Kurs
721324	Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri	721323	Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri	721324	Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri
72131	Pengeluaran untuk Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara	72131	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara	72131	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara

TERTULIS INDUK		TERTULIS PENJELASAN		SEHARUSNYA DIBACA	
MA	URAIAN	MA	URAIAN	MA	URAIAN
721331	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara	721311	Pengeluaran Pelunasan SPN	721311	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara
721332	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara melalui Pembelian Kembali	721312	Pengeluaran Pelunasan SPN melalui Pembelian Kembali	721312	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara melalui Pembelian Kembali
7244	Penyertaan Modal Negara Lainnya	7249	Penyertaan Modal Negara Lainnya	7243	Penyertaan Modal Negara Lainnya
72441	Penyertaan Modal Lainnya	72491	Penyertaan Modal Lainnya	72431	Penyertaan Modal Negara Lainnya
724311	Penyertaan Modal Lainnya	724911	Penyertaan Modal Lainnya	724311	Penyertaan Modal Negara Lainnya
724312	Penyertaan Modal Negara SMF	724912	Penyertaan Modal Negara SMF	724312	Penyertaan Modal Negara SMF
725111	Penerusan Pinjaman dalam Negeri kepada Pemda	725111	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Kepada Daerah	725111	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Kepada Pemda
725114	Penerusan Pinjaman dalam Negeri kepada Non Pemerintah	725113	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Kepada Non Pemerintah	725114	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Kepada Non Pemerintah
725211	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan Kepada Daerah	725211	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan	725211	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan Kepada Pemda
725212	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan Kepada BUMD	725212	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMD Tahun Anggaran Berjalan	725212	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan Kepada BUMD
725213	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan Kepada BUMN	725213	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan	725213	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan Kepada BUMN
725221	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu Kepada Daerah	725221	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Th. Anggaran Yang Lalu	725221	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu Kepada Pemda
725222	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu Kepada BUMD	725222	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMD Tahun Anggaran Yang Lalu	725222	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu Kepada BUMD
725223	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu Kepada BUMN	725223	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Yang Lalu	725223	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu Kepada BUMN
		611134	Transfer BPHTB Bagian Pemerintah Pusat dibagikan untuk Perbaikan Administrasi Pertanahan		TIDAK DIGUNAKAN
		611135	Transfer BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk biaya Adm.Pengkt.Pel. BPHTB		TIDAK DIGUNAKAN

TERTULIS INDUK		TERTULIS PENJELASAN		SEHARUSNYA DIBACA	
MA	URAIAN	MA	URAIAN	MA	URAIAN
		611136	Transfer BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk Pemberian Imbalan Bunga		TIDAK DIGUNAKAN

DAFTAR PERUBAHAN/KOREKSI AKUN NERACA PADA BAGAN AKUN STANDAR

KELOMPOK NERACA (Semula)	KELOMPOK NERACA (menjadi)
1119 Kas pada Badan Layanan Umum	1119 Kas pada Badan Layanan Umum
11191 Kas	11191 Kas-BLU
111911 Kas dan Bank	111911 Kas dan Bank-BLU
111912 Dana yang akan Dijaminkan	111912 Dana yang akan Dijaminkan-BLU
111913 Dana yang akan dipadankan	111913 Dana yang akan dipadankan-BLU
111914 Dana yang akan digulirkan	111914 Dana yang akan digulirkan-BLU
11192 Setara Kas	11192 Setara Kas-BLU
111921 Surat Berharga	111921 Surat Berharga-BLU
111929 Setara kas Lainnya	111929 Setara kas Lainnya-BLU
1131 Piutang Pajak	1131 Piutang Pajak
11312 Piutang Pajak PPh Non Migas	11312 Piutang Pajak PPh Non Migas
113128 Piutang PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	113128 Piutang PPh Final
1133 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	1133 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
11331 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	11331 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
113311 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	113311 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1134 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	11332 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
11341 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	11332 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
113411 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	113321 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
1139 Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	1139 Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum
11391 Piutang Sewa	11391 Piutang Sewa-BLU
113911 Piutang Sewa Tanah	113911 Piutang Sewa Tanah-BLU
113912 Piutang Sewa Gedung	113912 Piutang Sewa Gedung-BLU
113913 Piutang Sewa Ruangan	113913 Piutang Sewa Ruangan-BLU
113914 Piutang Sewa Peralatan dan Mesin	113914 Piutang Sewa Peralatan dan Mesin-BLU
113919 Piutang Sewa Lainnya	113919 Piutang Sewa Lainnya-BLU
11392 Piutang dari Penjualan Aset	11392 Piutang dari Penjualan Aset-BLU
113921 Piutang dari Penjualan Aset Tetap	113921 Piutang dari Penjualan Aset Tetap-BLU

KELOMPOK NERACA (Semula)	KELOMPOK NERACA (menjadi)
113929 Piutang dari penjualan Aset lainnya	113929 Piutang dari penjualan Aset lainnya-BLU
11399 Piutang BLU Lainnya	11399 Piutang BLU Lainnya
113991 Piutang dari kegiatan non operasional lainnya	113991 Piutang dari kegiatan non operasional lainnya-BLU
1143 Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	1143 Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum
11431 Deposito Jangka Pendek	11431 Deposito Jangka Pendek-BLU
114311 Deposito	114311 Deposito-BLU
114319 Investasi Lainnya	114319 Investasi Lainnya-BLU
1216 Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum	1216 Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum
12161 Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa	12161 Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa-Non Permanen
121611 Investasi BLU Pelayanan Kesehatan	121611 Investasi BLU Pelayanan Kesehatan-Non Permanen
121613 Investasi BLU Pelayanan Pendidikan	121613 Investasi BLU Pelayanan Pendidikan -Non Permanen
121614 Investasi BLU Penunjang Konstruksi	121614 Investasi BLU Penunjang Konstruksi-Non Permanen
121615 Investasi BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi	121615 Investasi BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi-Non permanen
121619 Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	121619 Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya-Non Permanen
12162 Investasi BLU Pengelola Wilayah/Kawasan tertentu	12162 Investasi BLU Pengelola Wilayah/Kawasan tertentu-Non Permanen
121621 Investasi BLU Pengelola Kawasan Otorita	121621 Investasi BLU Pengelola Kawasan Otorita-Non Permanen
121622 Investasi BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu	121622 Investasi BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu-Non Permanen
121629 Investasi BLU Pengelola Kawasan Lainnya	121629 Investasi BLU Pengelola Kawasan Lainnya-Non Permanen
12163 Investasi BLU Pengelola Dana Khusus untuk Masyarakat	12163 Investasi BLU Pengelola Dana Khusus untuk Masyarakat-Non Permanen
121631 Investasi BLU Pengelola Dana Investasi	121631 Investasi BLU Pengelola Dana Investasi-Non Permanen
121632 Investasi BLU Pengelola Dana Bergulir	121632 Investasi BLU Pengelola Dana Bergulir-Non Permanen
121639 Investasi BLU Pengelola Dana Lainnya	121639 Investasi BLU Pengelola Dana Lainnya-Non Permanen
1222 Investasi Permanen Badan Layanan Umum	1222 Investasi Permanen Badan Layanan Umum
12221 Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa	12221 Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa-Permanen
122211 Investasi BLU Pelayanan Kesehatan	122211 Investasi BLU Pelayanan Kesehatan-Permanen
122212 Investasi BLU Pelayanan Pendidikan	122212 Investasi BLU Pelayanan Pendidikan -Permanen
122213 Investasi BLU Penunjang Konstruksi	122213 Investasi BLU Penunjang Konstruksi-Permanen

KELOMPOK NERACA (Semula)	KELOMPOK NERACA (menjadi)
122214 Investasi BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi	122214 Investasi BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi-Permanen
122219 Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	122219 Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya-Permanen
12222 Investasi BLU Pengelola Kawasan	12222 Investasi BLU Pengelola Kawasan-Permanen
122221 Investasi BLU Pengelola Kawasan Otorita	122221 Investasi BLU Pengelola Kawasan Otorita-Permanen
122222 Investasi BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu	122222 Investasi BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu-Permanen
122223 Investasi BLU Pengelola Kawasan Lainnya	122223 Investasi BLU Pengelola Kawasan Lainnya-Permanen
12223 Investasi BLU Pengelola Dana	12223 Investasi BLU Pengelola Dana-Permanen
122231 Investasi BLU Pengelola Dana Investasi	122231 Investasi BLU Pengelola Dana Investasi-Permanen
122232 Investasi BLU Pengelola Dana Bergulir	122232 Investasi BLU Pengelola Dana Bergulir-Permanen
122239 Investasi BLU Pengelola Dana Lainnya	122239 Investasi BLU Pengelola Dana Lainnya-Permanen
135 Aset Tetap BLU	135 Aset Tetap BLU
1351 Tanah Badan Layanan Umum	1351 Tanah Badan Layanan Umum
13511 Tanah	13511 Tanah-BLU
135111 Tanah	135111 Tanah-BLU
1352 Peralatan dan Mesin Tanah Badan Layanan Umum	1352 Peralatan dan Mesin Tanah Badan Layanan Umum
13511 Peralatan dan Mesin	13511 Peralatan dan Mesin-BLU
135211 Peralatan dan Mesin	135211 Peralatan dan Mesin-BLU
13512 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	13512 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin-BLU
135121 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	135121 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin-BLU
1353 Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum	1353 Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum
13531 Gedung dan Bangunan	13531 Gedung dan Bangunan-BLU
135311 Gedung dan Bangunan	135311 Gedung dan Bangunan-BLU
13532 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	13532 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan-BLU
135321 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	135321 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan-BLU
1354 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum	1354 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum
13541 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	13541 Jalan, Irigasi, dan Jaringan-BLU
135411 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	135411 Jalan, Irigasi, dan Jaringan-BLU
13542 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	13542 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU
135421 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	135421 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU
1355 Aset Tetap Lainnya Bangunan Badan Layanan Umum	1355 Aset Tetap Lainnya Bangunan Badan Layanan Umum
13551 Aset Tetap Lainnya	13551 Aset Tetap Lainnya -BLU
135511 Aset Tetap Lainnya	135511 Aset Tetap Lainnya-BLU

KELOMPOK NERACA (Semula)	KELOMPOK NERACA (menjadi)
13552 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	13552 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya-BLU
135521 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	135521 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya-BLU

**KODE AKUN PADA PMK 91/PMK.05/2007 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR
YANG TIDAK DIGUNAKAN LAGI SEJAK TAHUN 2009**

KODE	URAIAN AKUN
AKUN NERACA	
11362	Uang Muka Belanja Daerah
113621	Uang muka belanja dana perimbangan
113622	Uang muka belanja dana otonomi khusus dan penyesuaian
AKUN PENDAPATAN	
411319	Pendapatan PBB Lainnya
AKUN BELANJA	
512112	Belanja Uang Honor Tidak Tetap
535	Belanja Pemeliharaan Yang Dikapitalisasi
5351	Belanja Pemeliharaan Yang Dikapitalisasi
53511	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Yang Dikapitalisasi
535111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Yang Dikapitalisasi
535119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya Yang Dikapitalisasi
53512	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Yang Dikapitalisasi
535121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Yang Dikapitalisasi
535129	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dikapitalisasi
53513	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang Dikapitalisasi
535131	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Yang Dikapitalisasi
535132	Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi Yang Dikapitalisasi
535139	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Yang Dikapitalisasi
53519	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya Yang Dikapitalisasi
535199	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya Yang Dikapitalisasi
5362	Belanja Dana Bergulir
53621	Belanja Dana Bergulir
536211	Belanja Dana Bergulir
AKUN TRANSFER KE DAERAH	
611244	Transfer DBH iuran tetap dan iuran produksi untuk Propinsi
611245	Transfer DBH iuran tetap dan iuran produksi untuk Kab./Kota Penghasil
611246	Transfer DBH iuran tetap dan iuran produksi untuk Kab./Kota Lainnya
61312	Transfer DAK Bidang Kesehatan
613121	Transfer DAK Bidang Kesehatan
61313	Transfer DAK Bidang Infrastruktur

KODE	URAIAN AKUN
613131	Transfer DAK Bidang Infrastruktur
61314	Transfer DAK Bidang Prasarana Pemerintahan
613141	Transfer DAK Bidang Prasarana Pemerintahan
61315	Transfer DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
613151	Transfer DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
61316	Transfer DAK Bidang Pertanian
613161	Transfer DAK Bidang Pertanian
61317	Transfer DAK Bidang Lingkungan Hidup
613171	Transfer DAK Bidang Lingkungan Hidup
AKUN PEMBIAYAAN	
719112	Penyesuaian Penambahan Saldo Rek KUN Valuta USD karena selisih kurs
729112	Koreksi Penyesuaian Penurunan Saldo Rek KUN Valuta USD karena selisih kurs
AKUN NON ANGGARAN	
824119	Pengeluaran Kiriman Uang dari Bank Tunggal ke Bank Operasional I karena kesalahan melimpah